

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemberdayaan

2.1.1 Defenisi Pemberdayaan

Menurut etimologis pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan atau kapasitas. Berdasarkan pengertian tersebut, pemberdayaan dapat dipahami sebagai proses atau upaya untuk memperkuat, memberikan kemampuan, serta menyediakan metode atau cara dari pihak yang memiliki kekuasaan kepada pihak yang masih lemah atau belum memiliki kekuatan yang memadai.

Afriansyah (2023:5) Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan daya (*empowerment*) atau kekuatan (*strenghtening*) kepada masyarakat.

Pemberdayaan merujuk pada kapasitas individu, khususnya bagi kelompok yang rentan dan kurang berdaya, untuk:

1. Memperoleh akses terhadap berbagai sumber produktif yang dapat membantu mereka meningkatkan penghasilan serta mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan.
2. Terlibat secara aktif dalam proses pembangunan serta dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Pemberdayaan merujuk pada upaya untuk mendistribusikan kembali kekuasaan melalui perubahan dalam struktur sosial.

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan oleh individu, kelompok, maupun masyarakat secara luas, sehingga mereka memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan serta mengendalikan lingkungannya guna mewujudkan keinginannya. Hal ini juga mencakup kemudahan akses terhadap berbagai sumber daya yang berkaitan dengan pekerjaan, kegiatan sosial, dan aspek lainnya.

1.1.2 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Ramli (2019:2) Menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang memadukan nilai-nilai sosial. Pemberdayaan dipahami sebagai usaha untuk memperkuat peran individu dalam kehidupan dengan mendorong mereka agar memiliki keterampilan atau kekuatan untuk mengambil tindakan.

Sihombing (2024) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat di tingkat desa berfokus pada peningkatan kapasitas lokal dan kemandirian warga untuk menghadapi tantangan sosial-ekonomi. Pemberdayaan masyarakat dipandang sebagai konsep pembangunan ekonomi yang memuat nilai-nilai sosial, mencerminkan paradigma pembangunan baru yang berorientasi pada manusia (*people centered*), mengedepankan partisipasi (*participatory*), mendorong pemberdayaan (*empowering*), dan berkelanjutan (*sustainable*). Konsep ini mencakup hal yang lebih luas daripada hanya sekadar memenuhi kebutuhan pokok atau menyediakan sistem perlindungan untuk mencegah terjadinya kemiskinan yang lebih parah.

Gagasan pemberdayaan menjadi pusat strategi keadilan sosial dan hak asasi manusia, meskipun istilah ini kerap digunakan secara berlebihan sehingga berisiko kehilangan makna sejatinya. Pemberdayaan juga menjadi inti dari konsep kerja komunitas, di mana banyak pekerja komunitas memilih untuk mendefinisikan peran mereka berdasarkan konteks pengembangan pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembangunan yang di dalamnya masyarakat secara aktif mengambil inisiatif untuk memulai kegiatan sosial guna memperbaiki kondisi dan situasi mereka sendiri. Proses ini hanya dapat terwujud jika warga terlibat secara partisipatif. Pemberdayaan masyarakat juga dipandang sebagai konsep

pembangunan ekonomi yang memuat nilai-nilai sosial, mencerminkan paradigma baru yang berorientasi pada manusia (people centered), partisipatif (participatory), memberdayakan (empowering), dan berkelanjutan (sustainable).

Utami (2019) mengemukakan bahwa dalam perspektif pemberdayaan, masyarakat diberikan kewenangan untuk mengelola secara mandiri dana pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun pihak lain. Selain itu, masyarakat dituntut untuk berperan aktif dalam proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan. Konsep pemberdayaan sendiri lahir dari proses interaktif, baik pada tingkat ideologis maupun praktis. Pada tataran ideologis, konsep ini merupakan hasil perpaduan antara pendekatan dari atas ke bawah (top-down) dan dari bawah ke atas (bottom-up), serta antara strategi pertumbuhan (growth strategy) dan strategi yang berpusat pada manusia (people-centered strategy).

Safitriani (2024) memberikan penjelasan lebih mendalam bahwa masyarakat yang berdaya adalah mereka yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan motivasi; memperoleh kesempatan; mampu memanfaatkan peluang; memiliki energi; dapat bekerja sama; memahami berbagai alternatif; mampu mengambil keputusan; berani menanggung risiko; mampu mencari dan mengolah informasi; serta dapat bertindak sesuai dengan situasi yang dihadapi.

Tujuan dari upaya pemberdayaan masyarakat adalah menjadikan mereka mandiri, yakni memiliki potensi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi serta mampu memenuhi kebutuhan tanpa bergantung pada bantuan pihak luar, baik pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Bantuan berupa pendampingan teknis memang diperlukan, namun sifatnya harus mendorong lahirnya prakarsa masyarakat untuk membangun, bukan justru mematikan inisiatif tersebut.

Konsep pemberdayaan masyarakat bukan sekadar istilah populer, melainkan merupakan fondasi penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pada bagian ini, pembahasan dimulai dengan pemahaman dasar tentang konsep tersebut, dimulai dari definisi dan batasannya, kemudian dilanjutkan dengan menelusuri perkembangan konsep ini dari waktu ke waktu serta pengaruh berbagai teori yang membentuk pemahaman kita mengenai pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat bukan hanya sekadar memberikan bantuan atau sumber daya. Lebih dari itu, pemberdayaan berarti memberikan kendali kepada komunitas atas masa depan mereka sendiri, membekali mereka dengan alat dan pengetahuan untuk menghadapi tantangan, serta mendorong partisipasi aktif.

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membuka peluang bagi warga untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan hidup, menciptakan lapangan kerja, serta menumbuhkan kemandirian dalam membangun kehidupan yang layak, berkualitas, dan berkelanjutan. Sebagai sebuah proses, kegiatan pemberdayaan diharapkan mampu mengangkat taraf hidup masyarakat yang menjadi sasaran program, sehingga mereka menjadi lebih berdaya, sejahtera, dan pada akhirnya mandiri.

1.1.3 Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Strategi pemberdayaan masyarakat merupakan rangkaian kegiatan yang memiliki tujuan jelas untuk dicapai. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan pemberdayaan perlu didasari dengan strategi kerja yang tepat agar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Secara umum, strategi dapat diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan terencana yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan tertentu atau memberikan manfaat bagi pihak

yang menjadi sasaran.

Suharto (2022) menjelaskan bahwa proses pemberdayaan pada umumnya dilakukan secara kolektif. Tidak terdapat literatur yang menyebutkan bahwa pemberdayaan terjadi hanya dalam hubungan satu lawan satu antara pekerja sosial dan klien pada konteks bantuan individual. Meskipun pendekatan semacam itu dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan klien, hal tersebut bukanlah strategi utama dalam pemberdayaan. Namun, tidak semua intervensi pekerjaan sosial harus dilaksanakan secara kolektif. Dalam kondisi tertentu, strategi pemberdayaan dapat dilakukan secara individual, meskipun pada akhirnya tetap terhubung dengan pendekatan kolektif, yakni dengan mengaitkan klien pada sumber daya atau sistem lain di luar dirinya.

Secara konseptual strategi sering diartikan dengan pendekatan, seperti (Mardikanto dan Subianto, 2021; 167-168):

1. Strategi sebagai suatu rencana.

Sebagai suatu perencanaan, strategi berperan sebagai panduan atau acuan yang menjadi landasan pelaksanaan kegiatan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunannya, strategi senantiasa mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal, termasuk yang berasal dari para pesaing.

2. Strategi sebagai suatu kegiatan.

Sebagai sebuah kegiatan, strategi adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh individu, organisasi, atau perusahaan untuk meraih kemenangan dalam persaingan, guna mencapai tujuan yang diinginkan atau telah ditentukan sebelumnya.

3. Strategi sebagai suatu instrumen.

Sebagai instrumen, strategi merupakan alat yang digunakan oleh semua unsur pemimpin organisasi/perusahaan, terutama manajer puncak, sebagai pedoman sekaligus alat pengendali pelaksana kegiatan.

4. Strategi sebagai suatu system.

Sebagai sebuah sistem, strategi adalah rangkaian Langkah-

langkah yang komprehensif dan terkoordinasi, dirancang dan diarahkan untuk mengatasi berbagai tantangan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

5. Strategi sebagai pola pikir.

Sebagai pola pikir, strategi adalah suatu tindakan yang didasari oleh pemahaman mendalam mengenai kondisi internal dan eksternal dalam jangka waktu yang relatif panjang, disertai kemampuan mengambil keputusan dengan memilih alternatif terbaik. Strategi ini berupaya memaksimalkan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada, sekaligus menutupi kelemahan guna mengantisipasi atau meminimalkan potensi ancaman.

Dengan demikian pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

1. Menyusun instrumen pengumpulan data. Dalam kegiatan ini informasi yang diperlukan dapat berupa hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, referensi yang ada, dari hasil temuan dari pengamat lapangan.
2. Membangun pemahaman, komitmen untuk mendorong kemandirian individu, keluarga dan masyarakat.
3. Mempersiapkan system informasi, membangun system analisis, intervensi, monitoring, dan evaluasi pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat.

1.1.4 Dampak Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Januardin (2021:36) Pemberdayaan masyarakat memiliki dampak positif yang signifikan dalam membantu meningkatkan kualitas hidup dan perkembangan wilayah. Berikut adalah beberapa dampak pemberdayaan masyarakat:

1. Mempermudah proses koordinasi antarindividu.
2. Memberikan dorongan semangat satu sama lain.
3. Meningkatkan tingkat kesejahteraan secara luas.

4. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya agar lebih efektif dan efisien.
5. Dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat serta kelompok, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial.

1.1.5 Tantangan dan Hambatan

1. Tantangan mengelola usaha

Menurut Devi (2022:22), tantangan merupakan suatu kondisi atau bentuk usaha yang bertujuan untuk mengasah dan menguji kemampuan. Dalam penerapan industri, terdapat beragam tantangan yang harus dihadapi, di antaranya yang paling menonjol meliputi perubahan paradigma bisnis, isu terkait keamanan dan perlindungan, permasalahan hukum serta hak kekayaan intelektual, standarisasi, perancangan dan pengaturan pekerjaan, serta resistensi terhadap perubahan (Fauzan, 2018).

Berdasarkan kajian literatur sebelumnya, tantangan dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu tantangan budaya yang berkaitan dengan hubungan antarpribadi dan faktor komunikasi, tantangan manajerial seperti peran dan dukungan dari manajemen organisasi, tantangan bisnis yang mencakup kualitas pelayanan pelanggan dan pengembangan inovasi produk, tantangan hukum, serta tantangan teknologi yang mencakup penyediaan infrastruktur dan investasi dalam teknologi.

2. Hambatan Mengelola Usaha

Menurut Prayetno (2022), hambatan adalah suatu usaha yang muncul dari dalam diri sendiri dan bersifat atau bertujuan untuk melemahkan serta menghalangi, meskipun tidak secara konseptual. Salah satu bentuk hambatan yang dapat terjadi di perusahaan adalah tingginya tingkat pergantian karyawan,

terutama yang memiliki pengetahuan penting terkait pekerjaan. Kondisi ini dapat menyebabkan perusahaan kehilangan tenaga kerja yang berpengalaman dalam proses produksi. Selain itu, perusahaan juga harus menanggung kerugian dalam bentuk biaya dan waktu yang diperlukan untuk melatih karyawan baru.

Pada faktanya, setiap perusahaan menghadapi keterbatasan dalam sumber daya produksi yang disebut sebagai kendala atau constraint. Kendala ini merupakan berbagai faktor yang menghalangi kelancaran proses produksi. Dengan semakin ketatnya persaingan di pasar global, perusahaan industri dituntut untuk lebih cepat dalam mengenali dan mengantisipasi berbagai kendala yang muncul, baik yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan.

2.2 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

2.2.1 Defenisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM.22 Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2.2.2 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Kriteria dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di atur dalam Undang-undang No.20 Tahun 2008 yaitu:

1. Kriteria Usaha mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling besar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha kecil adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hingga maksimum Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha menengah adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hingga paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai paling tinggi 50.000.000.000,00 (lima puluh

milyar rupiah).

2.3 Penelitian terdahulu

2.1 Tabel penelien terdahulu.

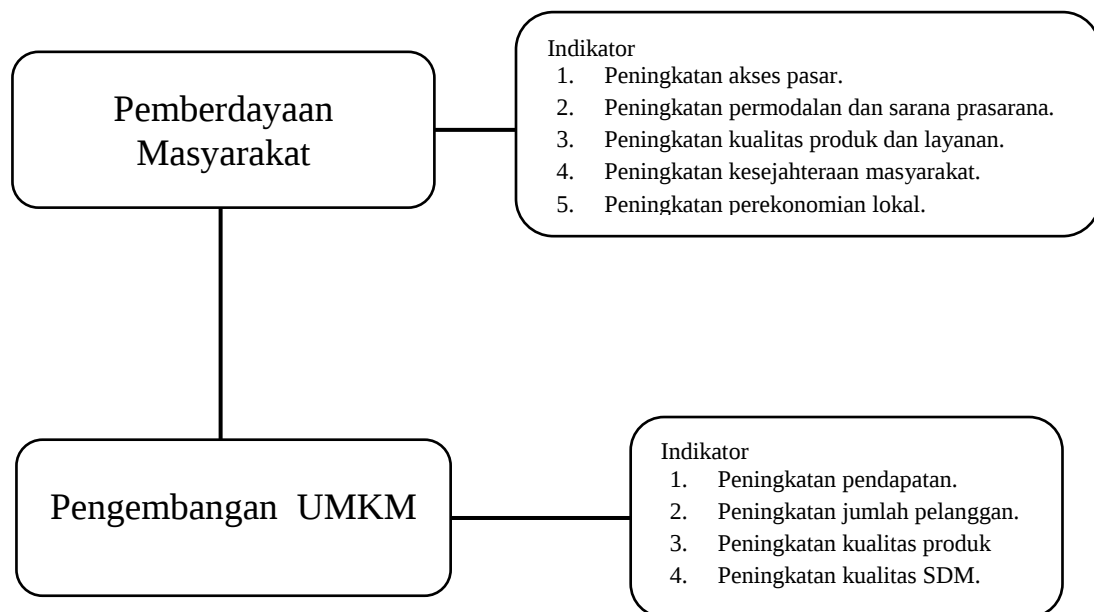
No	Tahun	Judul penelitian	Nama penulis	Metode penelitian	Hasil penelitian
1	2024	Pemberdayaan Umkm dalam meningkatkan kemandirian masyarakat	Nur Rachma	Kualitatif	Pengusaha memiliki peningkatan dan pemahaman tentang kewirausahaan 80%,
2	2023	Pemberdayaan umkm guna meningkatkan potensi lokal (studi kasus di desa pasir kembang)	Muhamma d Rama Humam Utomo	metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Keberadaan UMKM dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan berperan dalam menggerakkan perekonomian lokal desa khususnya di Desa Pasir Kembang
3	2023	Pemberdayaan masyarakat berbasis kewirausahaan sosial dalam pengembangan UMKM di kabupaten sumedang.	Wiwi siti syajaya rotunnisa	Pendekatan kualitatif	Hasil dari penelitian yang diperoleh ini menunjukkan bahwa adanya kegiatan yang memenuhi kriteria kewirausahaan sosial.
4	2022	Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dikelurahan watang soreang kota Pare-pare	Siti hadjerah	Kualitatif	Faktor penghambat dalam pengembangan UMKM yaitu faktor internal, kurangnya permodalan dan terbatasnya akses biaya kualitas sumber daya manusia (SDM).
5	2024	Pemberdayaan pelaku umkm dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di desa panutan kecamatan pagelaran kabupaten pringsewu.	Fitriah	Kualitatif	kegiatan pemberdayaan pelaku UMKM yang ada di Desa Panutan sudah membawa pengaruh terhadap pendapatan ekonomi masyarakat.

Sumber : Olahan Peneliti 2025.

2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka pikir merupakan suatu gambaran atau model konseptual yang menjelaskan keterkaitan antara berbagai variabel. Keterkaitan tersebut biasanya disajikan dalam bentuk diagram atau skema dengan tujuan memudahkan pemahaman terhadap hubungan yang dimaksud.

Fokus penelitian ini adalah pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berlokasi di Desa Gawu-gawu Bouso, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli. Penelitian ini memusatkan perhatian pada proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan menggunakan teori pemberdayaan. Selain itu, dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut, diterapkan juga strategi pemberdayaan yang berfokus pada pengembangan UMKM di Desa Gawu-gawu Bouso.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Berdasarkan gambar 2.1 kerangka berpikir diatas indikator pemberdayaan masyarakat, menurut Afriansyah (2023:103) menjelaskan bahwa:

1. Peningkatan akses pasar adalah usaha memperluas jangkauan suatu bisnis atau negara dalam memasarkan barang dan jasa ke wilayah yang lebih luas. Hal ini memungkinkan tercapainya lebih banyak calon konsumen, baik di tingkat lokal maupun internasional, sehingga dapat membuka peluang pertumbuhan penjualan dan ekonomi. Langkah ini juga dapat mencakup pengurangan hambatan perdagangan, seperti tarif, bea masuk, dan kuota.
2. Peningkatan permodalan dan sarana prasarana mengacu pada langkah-langkah untuk menambah ketersediaan dana (modal) dan fasilitas pendukung agar lembaga atau perusahaan dapat menjalankan operasional secara lebih optimal. Proses ini meliputi perencanaan, pengadaan, pengelolaan, hingga pemeliharaan aset yang ada, serta penyediaan fasilitas baru sesuai kebutuhan.
3. Peningkatan kualitas produk dan layanan merupakan proses memperbaiki fitur, karakteristik, serta kinerja produk atau jasa agar dapat memenuhi bahkan melampaui ekspektasi pelanggan. Kualitas yang optimal menjadi kunci bagi terciptanya kepuasan, loyalitas konsumen, dan keberhasilan usaha.
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah upaya untuk memperbaiki kualitas hidup individu maupun kelompok secara menyeluruh, mencakup aspek material, spiritual, dan sosial. Hal ini melibatkan pemenuhan kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial, serta memberikan akses yang lebih luas terhadap peluang pengembangan diri.
5. Peningkatan perekonomian lokal merujuk pada upaya mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi di wilayah tertentu, seperti desa atau kota, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Proses ini umumnya melibatkan pengembangan usaha, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan penduduk lokal.

Menurut Fathorrahman dalam Rizky (2022) menjelaskan indikator pengembangan UMKM sebagai berikut:

1. Peningkatan pendapatan dapat dicapai dengan memaksimalkan keuntungan dari hasil operasional atau kegiatan usaha, yang pada akhirnya mendorong perkembangan bisnis ke arah yang lebih positif.
2. Peningkatan jumlah pelanggan akan berdampak langsung pada naiknya volume penjualan produk.
3. Peningkatan kualitas produk akan mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli, di mana semakin baik mutu produk, semakin tinggi pula minat pembelian.
4. Peningkatan kualitas SDM dilakukan dengan membentuk sumber daya manusia yang kompeten, mampu bekerja secara efektif dan efisien, serta memberikan kinerja dan prestasi yang optimal bagi perusahaan.